

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN  
PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENIMBUNAN BARANG KEBUTUHAN POKOK**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**DIMAS RIYAN PRASETYO  
NPM. 19.81.0414**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN  
MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI  
BANJARMASIN  
2023**

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN  
PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENIMBUNAN BARANG KEBUTUHAN POKOK**

**SKRIPSI**

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program  
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan



**Oleh:**

**DIMAS RIYAN PRASETYO  
NPM. 19.81.0414**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN  
MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI  
2023**

## ABSTRAK

**Dimas riyan prasetyo. NPM 19810414 2023. ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIMBUNAN BARANG KEBUTUHAN POKOK.** Skripsi dari fakultas hukum universitas islam kalimantan, muhammad arsyad al - banjari, di bimbing oleh Dr. Afif khalid , S.HI, SH, MH. Selaku pembimbing I dan Muthia septarina, SH, MH sebagai pembimbing II.

Kata kunci : *Penimbunan, Pertanggungjawaban pidana, barang kebutuhan pokok.*

penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penimbunan barang kebutuhan pokok berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode analisis normatif untuk menyelidiki ketentuan hukum yang terkait dengan tindak pidana penimbunan, serta meninjau putusan pengadilan terkait untuk memahami pendekatan hukum yang digunakan dalam memutus perkara semacam ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa tindak pidana penimbunan barang kebutuhan pokok diatur dalam peraturan hukum tertentu yang melarang dan mengkriminalisasi perilaku tersebut. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penimbunan dapat meliputi hukuman penjara, denda, atau sanksi lain sesuai dengan tingkat keseriusan tindakan yang dilakukan. Namun, dalam prakteknya, terdapat tantangan dalam penegakan hukum terhadap pelaku penimbunan. Beberapa faktor seperti kurangnya bukti yang kuat, keterbatasan sumber daya, dan adanya keterlibatan pihak-pihak yang berpengaruh, seringkali mempengaruhi efektivitas upaya penegakan hukum. Dalam menghadapi tantangan tersebut, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan kerjasama antara pihak penegak hukum, instansi terkait, dan masyarakat. Penguatan koordinasi dan peran lembaga-lembaga terkait, seperti Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dan Kepolisian, menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penimbunan barang kebutuhan pokok.

### **ABSTRACT**

**Dimas riyan prasetyo. NPM 19810414 2023. JURIDICAL ANALYSIS OF CRIMINAL ACCOUNTABILITY FOR PERSONS OF THE CRIMINAL ACTION OF STANDARD COLLECTION.** Thesis from the Faculty of Law, Islamic University of Kalimantan, Muhammad Arsyad Al - Banjari, supervised by Dr. Afif khalid , S.HI, SH, MH. As supervisor I and Muthia septarina, SH, MH as supervisor II.

*Keywords: Hoarding, Criminal liability, staple goods This*

*study aims to analyze criminal liability for the perpetrators of the crime of hoarding staple goods based on the laws and regulations in force in Indonesia. This study uses a normative analysis method to investigate legal provisions related to the crime of hoarding, as well as to review related court decisions to understand the legal approach used in deciding cases of this kind. The results of the analysis show that the crime of hoarding staple goods is regulated in certain legal regulations that prohibit and criminalize this behavior. Criminal liability for the perpetrators of hoarding can include imprisonment, fines, or other sanctions according to the seriousness of the actions committed. However, in practice, there are challenges in law enforcement against hoarders. Several factors, such as the lack of strong evidence, limited resources, and the involvement of influential parties, often influence the effectiveness of law enforcement efforts. In dealing with these challenges, a holistic approach is needed that involves collaboration between law enforcement agencies, related agencies, and the community. Strengthening coordination and the role of related institutions, such as the Commodity Futures Trading Supervisory Agency (Bappebti) and the Police, is the key to increasing the effectiveness of law enforcement against the crime of hoarding basic necessities.*

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Chairuman Pasaribu dan Sahrawardi K. Lubis, (2004) *Hukum Perjanjian Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.47.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan, Cet ke-1, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 21.
- Hanafi, Mahrus, Sistem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm-16
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta, Rajawali Pers, hlm-52
- H.A. Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hal 222
- H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, Hukum Pidana, Setara Press, Malang, 2015, hlm 205
- Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997,
- L. J. van Apeldorn, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 2011, hlm. 324
- Moeljatno, S.H., M.H. ,Asas-asas Hukum Pidana , Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 1
- Moeljatno, Asas – asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 8
- Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 364
- Roeslan saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm-33
- Teguh Prasetya, Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, 2011, hlm.7
- Takdir, Mengenal Hukum Pidana, Jakarta: Laskar Perubahan, 2013, hlm. 2-3

## Jurnal

A Ode Yogi Pradana, dkk., "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Perbuatan Penimbunan Minyak Goreng", *Jurnal Lex Suprema*, Volume 4 Nomor II, September 2022, hlm. 1112

Farawangsa                      Kaharap                      Npm.                      1806200207  
[http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/19178/SKRIPSI\\_FARAWANGSA%20HARA HAP\\_1806200207.pdf?](http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/19178/SKRIPSI_FARAWANGSA%20HARA HAP_1806200207.pdf?)

Journalist Camp "Peningkatan Kapasitas Jurnalis dalam Mendukung Kampanye Keadilan Pangan" yang digelar AJI Gorontalo, 15-16 Februari 2014. diakses online pada tanggal 04 maret 2023 <http://eprints.undip.ac.id>, "Pangan" yang digelar AJI Gorontalo, 15-16 Februari 2014.

Yusep Mulyana, "Penegakan Hukum oleh Polri Terhadap Tindak Pidana Penimbun Minyak Goreng", *JOEL: Journal of Educational and Language Research*, Vol. 1, No. 7, Februari 2022, hlm. 1061

Jurnal Syarif Fadillah Aspek Hukum Tindak Pidana ASPEK HUKUM TINDAK PIDANA PENYIMPANAN/ BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 1 | JURISDICTIE | Vol. 1| No.2 |2019 halaman 5

Jurnal Aspek hukum tindak pidana penyimpanan/ barang kebutuhan pokok dan barang penting Abdi, Syarif Fadillah, Damrah Mamang Universitas Islam As-Syafi'iyah JURISDICTIE | Vol. 1| No.2 |2019 .

Jurnal Pendidikan Tambusai Sanksi Tindak Pidana Bagi Pelaku Penimbun Benda Primer Serta Benda Berharga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Tulus Rifwandi Gea Halaman 4754-4763 Volume 6 Nomor 1 Tahun 2022.

Yusep Mulyana, "Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Tindak Pidana Penimbun Minyak Goreng", *Journal of Educational and Language Research*. Maret 2022, hlm 3

### **Perundang Undangan**

diakses online pada tanggal 05 maret 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/uu-no-7-tahun-2014> Undang Undang 7 tahun 2014 tentang perdagangan

Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Undang-Undang No.71 Tahun 2015 tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan pokok dan barang penting

Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Larangan Melakukan Penimbunan atau Penyimpanan Pangan dan Barang Kebutuhan Pokok

Undang-Undang No. 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-barang Penting

### **Website**

diakses online pada tanggal 05 Maret 2023, <https://Kalsel.ineews.id> palda kalsel bongkar kasus penimbunan minyak goreng

diakses online pada tanggal 4 Mei 2023, [www.kbbi/penimbunan.go.id](http://www.kbbi/penimbunan.go.id) penimbunan bahan kebutuhan pokok

diakses online pada tanggal 4 Mei 2023, Penimbunan Bahan Kebutuhan Pokok [www.kbbi/penimbunan.go.id](http://www.kbbi/penimbunan.go.id)

Diakses online pada tanggal 17 juli 2023 <http://www.pendidikanekonomi.com/cara-menangani-kenaikan-harga-barang.html>,